

STRATEGI FILIPINA DALAM MENGHADAPI AGRESIVITAS TIONGKOK DI KEPULAUAN SPRATLY

Andha Umar Auf Rabbani¹, Rendy Wirawan²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Klaim 9 garis putus-putus merupakan klaim yang dibuat oleh Tiongkok di Kawasan Laut Tiongkok Selatan. Klaim tersebut mengklaim keseluruhan Kawasan Laut Tiongkok Selatan sehingga menjadikan Kawasan tersebut menjadi Kawasan konflik. Kepulauan Spratly yang ditempati oleh negara Filipina merupakan bagian dari klaim 9 garis putus-putus. Filipina menggugat Tiongkok di Lembaga *permanent court of arbitration*. Meskipun Filipina menang namun melihat respon Tiongkok yang menolak tegas Keputusan PCA, Filipina perlu mencari Langkah strategi selanjutnya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Kepulauan Spratly Filipina. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly. Penulis menggunakan konsep *bandwagoning* untuk menjawab strategi Filipina. Faktor *geographic proximity* dan *aggressive intention* menunjukkan Tiongkok merupakan ancaman nyata bagi Filipina. Melalui faktor *aggregate power* dan *offensive power* menampilkan bahwa Tiongkok memiliki sumber daya yang besar sehingga Filipina dapat melakukan Kerjasama dengan Tiongkok agar mempertahankan Kepulauan Spratly, melalui Kerjasama ekonomi dan keamanan.

Kata Kunci: Kepulauan Spratly, Filipina, Tiongkok, agresivitas, *bandwagoning*

Abstract

The nine-dash line claim is a claim made by China in the South China Sea. The claim covers the entire South China Sea, turning the area into a conflict zone. The Spratly Islands, occupied by the Philippines, are part of the nine-dash line claim. The Philippines sued China at the Permanent Court of Arbitration. Although the Philippines won, seeing China's response of firmly rejecting the PCA's decision, the Philippines needs to find the next strategic step to maintain the sovereignty of the Philippine Spratly Islands. This paper aims to describe the Philippines' strategy in dealing with China's aggressiveness in the Spratly Islands. The author uses the concept of bandwagoning to explain the Philippines' strategy. The factors of geographic proximity and aggressive intention show that China is a real threat to the Philippines. The factors of aggregate power and offensive power show that China has vast resources, so the Philippines can cooperate with China to defend the Spratly Islands through economic and security cooperation.

Keywords: Spratly Islands, Philipines, China, aggressiveness, *bandwagoning*

1. PENDAHULUAN

Kawasan Laut Tiongkok Selatan hingga saat ini masih menjadi kawasan yang menarik perhatian banyak negara. Letak geografis Laut Tiongkok Selatan berada di kawasan Asia Pasifik. Laut Tiongkok Selatan juga berbatasan dengan sejumlah

negara seperti, Tiongkok, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Taiwan, Singapura dan Filipina. Laut Tiongkok Selatan memiliki luas sekitar 8.000 km² yang di dalamnya terdapat banyak pulau salah satunya Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly terdiri dari ratusan pulau kecil dan terumbu karang. Kepulauan Spratly terletak di bagian selatan Laut Tiongkok Selatan yang terbentang dari Singapura di barat daya hingga ke Taiwan di bagian timur laut (Nasir & Dahalan, 2017). Kepulauan Spratly ini juga ditempati sejumlah negara yaitu Filipina, Tiongkok, Taiwan, Malaysia dan Vietnam. Negara Tiongkok membuat klaim yang kontroversial yaitu adanya klaim *nine dashed line*.

Gambar 1. Peta Klaim *Nine dashed line*



Sumber: *The Economist*, 2014

Garis putus-putus berwarna merah diatas merupakan *Nine Dash Line* atau Sembilan garis putus-putus. *Nine dash line* merupakan istilah yang dibuat oleh Tiongkok yang dikeluarkan oleh pemerintahan Tiongkok pada tahun 1947. Tiongkok mengatakan bahwa *Nine Dash Line* ialah bagian dari hak historis wilayah kedaulatan Tiongkok (ICAS, 2023). Klaim yang dilakukan Tiongkok tersebut menjadi kontroversial karena klaim tersebut tumpang tindih dengan negara negara yang menempati Kepulauan Spratly. Adanya klaim *nine dash line* tersebut membuat Kawasan Kepulauan Spratly menjadi Kawasan konflik. Filipina mulai berkonflik dengan Tiongkok mengenai Kepulauan Spratly sejak tahun 1995 (Inuhan et al., 2021). Puncaknya pada tahun 2011-2012 ketika terjadi insiden bentrokan kapal survey minyak Filipina dan kapal patroli Tiongkok di Kepulauan Spratly. Pemerintah Filipina mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok adalah agresif.

Hingga di tahun 2013 Filipina mengajukan ke lembaga pengadilan arbitrase internasional yaitu *permanent court of arbitration* (PCA). Pada 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan keputusannya. PCA memutuskan memenangkan Filipina, PCA juga mempertegas Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Filipina merupakan bagian zona ekonomi eksklusif (ZEE). Oleh karena itu Filipina berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penggunaan sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusifnya (*press-release* PCA, 2016). Kemudian PCA juga memutuskan klaim nine dash line Tiongkok merupakan klaim yang tidak sah sehingga Tiongkok tidak berhak mengklaim kedaulatan sepenuhnya Kepulauan Spratly (*press-release* PCA, 2016). Atas keputusan tersebut, Filipina menyambut baik keputusan yang dikeluarkan PCA sementara Tiongkok secara tegas tidak menerima dan tidak mengakui putusan PCA (Zebua & Shiddiqiy, 2025). Meskipun Filipina menang dalam proses arbitrase PCA namun Keputusan tersebut masih belum cukup. Karena keputusan PCA tidak mengikat, tidak adanya sanksi jika tidak mematuhi keputusan tersebut. Hal itu terbukti ketika pemerintah Tiongkok menolak keputusan PCA serta Tiongkok masih tegas mengenai klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu menarik untuk melihat langkah strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana strategi Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly.

2. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian penulis yaitu mengetahui dan menggambarkan strategi Filipina maka jenis penelitian penulis ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang ditujukan untuk memberikan fakta fakta dan gejala gejala sebuah fenomena secara sistematis dan akurat, mengenai sifat sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al, 2020). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan (Hikmawanti F, 2020). pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak sebelumnya atau tidak secara langsung diteliti

penulis melainkan melalui media perantara. Berhubungan dengan data penelitian penulis yaitu menggunakan data sekunder maka dalam teknik pengumpulan data ini penulis akan lebih banyak menggunakan studi pustaka atau *library research*. Kemudian penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan analisis yang berlandaskan pandangan postpositivisme menganggap realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh dengan hubungan gejala yang interaktif (Sugiyono, 2013).

KERANGKA TEORI

KONSEP *BANDWAGONING*

Menurut Stephen M. Walt *bandwagoning* ialah perilaku sebuah negara beraliansi dengan negara yang merupakan ancaman bagi negara pelaku *bandwagoning* (Walt, 1985). Walt mengemukakan bahwa ada tiga kondisi yang mendorong suatu negara melakukan *bandwagoning*. Pertama, terdapat kondisi negara kuat dan negara lemah. Negara negara lemah menunjukkan akan kecenderungan melakukan *bandwagoning* dengan pertimbangan negara lemah hanya dapat memberikan sedikit kontribusi dalam suatu aliansi. Kemudian juga karena mereka rentan terhadap serangan, ancaman dan tidak memiliki kekuatan signifikan. Alasan kedua, ketika negara lemah tidak memiliki sekutu untuk beraliansi maka negara lemah cenderung melakukan *bandwagoning*. Alasan ketiga, *bandwagoning* dilakukan karena dengan pertimbangan oportunis bahwa negara pelaku *bandwagoning* percaya bahwa negara yang memiliki ancaman lebih besar memiliki kemungkinan tertinggi untuk menang dalam perang (Walt, 1987).

Kemudian Walt mengatakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi negara untuk bertindak *bandwagoning* empat faktor ancaman tersebut adalah (Walt, 1987). Faktor pertama, *Aggregate Power* ialah total sebuah sumber daya negara seperti ekonomi, militer, dan populasi. Semakin besar total sumber daya negara maka semakin besar potensi ancaman bagi negara lainnya. Faktor kedua, *Geographic Proximity* ialah merupakan jarak wilayah antara negara satu dengan negara lainnya. Umumnya menggunakan jarak antara ibu kota negara yang lebih dekat. Semakin dekat jarak antara suatu negara dengan negara yang kuat semakin besar

menimbulkan ancaman dan kecenderungan untuk melawan. Faktor ketiga, *Offensive Power* adalah kemampuan negara untuk mengancam kedaulatan atau integritas wilayah negara lain. Faktor ini dapat diukur melalui kapabilitas militer. Semakin kuat kapabilitas militer suatu negara maka semakin besar potensi ancaman dari negara tersebut. Terakhir faktor keempat, *Aggressive Intention* adalah merupakan intensi mengancam. Umumnya intensi ini dapat dilihat dari pernyataan yang dibuat oleh kepala negara yang menyatakan motivasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan militer serta motivasi untuk menyerang negara lain. Kemudian aggressive intention juga dapat diukur melalui kebijakan dan manuver yang dipilih negara pengancam untuk menampilkan niat agresif. *Bandwagoning* menurut Randall Scheweller bukanlah sekedar tindakan mencari keamanan atau menghindari ancaman, melainkan juga merupakan strategi untuk mendapatkan keuntungan dari bergabung dengan kekuatan yang lebih besar (Scheweller, 1994).

3. STRATEGI FILIPINA DALAM MENGHADAPI AGRESIVITAS TIONGKOK DI KEPULAUAN SPRATLY

Kondisi Geopolitik Kepulauan Spratly

Kepulauan Spratly merupakan Kepulauan yang terletak di Laut Tiongkok Selatan bagian Selatan. Kepulauan ini terdiri dari ratusan pulau dan ratusan terumbu karang. Wilayah Kepulauan Spratly membentang seluas 410.000 Km² (Fatmawati, 2019). . Kepulauan Spratly berposisi strategis sebagai jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (Yuniati & Susilo, 2013). Jumlah pulau diperkirakan hingga 650 namun jumlah pulau di Kepulauan Spratly tidak pasti karena banyak pulau yang tidak bertahan lama dan terendam oleh air laut. Kepulauan Spratly juga memiliki sumber daya alam melimpah. Sumber daya yang dapat membantu untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kekayaan Kepulauan Spratly terdapat perikanan, Cadangan minyak yang melimpah sekitar 105 Miliar barel dan hidrokarbon berupa gas alam sekitar 60%-70% (Karmilawaty & Janvy, 2024). Selain kekayaan sumber daya alam, Kawasan Kepulauan Spratly juga menjadi wilayah yang strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia

Filipina merupakan salah satu negara yang menguasai beberapa pulau di Kepulauan Spratly. Filipina menempati 9 pulau di Kepulauan Spratly yaitu Pulau Thitu, Nanshan, Flat, Lankiam Cay, Commodore Reef, West York, Loaita, Second Thomas Soal dan Northeast Cay (Inuhan et al.,2021). Selain Filipina kawasan Kepulauan Spratly diklaim oleh sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Beberapa negara menamai Kepulauan Spratly dengan nama yang berbeda beda. Filipina menyebut Kepulauan Spratly ialah Kepulauan Kalayaan, Tiongkok menyebut Nansha Quadao, Taiwan menyebut Shinnegunto, Vietnam menyebut dengan Dao Truong Sa, Malaysia menamai Terumbu Layang (Pamungkas, 2013).Vietnam menguasai 9 pulau di Kepulauan Spratly (Quy, 2014) Selanjutnya, Taiwan mengklaim satu pulau di Kepulauan Spratly bernama Pulau Taiping (Nugraha, 2021). Malaysia menguasai 5 pulau di Kepulauan Spratly (Nasir & Dahalan, 2017). Tiongkok menguasai 7 pulau di Kepulauan Spratly (Gofa & Fitriliani, 2025). Terakhir Brunei Darussalam tidak menguasai pulau yang ada di Kepulauan Spratly namun Brunei mengklaim satu pulau di Kepulauan Spratly yaitu *Louisa Reef*. Karena Kepulauan Spratly menjadi bagian perairan ZEE Brunei Darussalam (Nasir & Dahalan, 2017).

Klaim *nine dash line* Tiongkok membuat situasi menjadi rumit karena klaim tersebut mengklaim keseluruhan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya terdapat Kepulauan Spratly. Pada tahun 1947 Tiongkok membuat peta yang di dalamnya terdapat 9 garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan. Peta yang dibuat oleh Tiongkok tersebut mencakupi keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan menurut Pemerintah Tiongkok klaim Kepulauan Spratly berdasarkan hak historis. Wilayah Laut Tiongkok Selatan pertama kali ditemukan oleh Dinasti Han pada abad ke 2 M (Masehi).

Konflik Filipina dan Tiongkok di Kepulauan Spratly

Filipina mengklaim Kepulauan Spratly di tahun 1947.Pada saat tahun 1947 seorang pengusaha Filipina pemilik armada maritim swasta yaitu Thomas Cloma menemukan dan mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Spratly. Kemudian Cloma membangun koloni di pulau - pulau yang ia klaim. Tahun 1971 pemerintah Filipina secara resmi mengklaim Kepulauan Spratly atas dasar penemuan Thomas Cloma dan

di tahun 1974 Thomas Cloma memindahkan klaimnya ke Pemerintah Filipina. Selanjutnya Presiden Ferdinand Marcos di tahun 1978 memasukan Kepulauan Spratly di bawah administrasi Provinsi Palawan (Joyner, 1999). Pemerintah Filipina menamakan Kepulauan Spratly sebagai Kepulauan Kalayaan Provinsi Palawan. klaim Filipina didasarkan pada hukum UNCLOS yang didukung dengan pernyataan geologis. Bahwa landas kontinen yang disebut sebagai gugusan Kepulauan Kalayaan disandingkan dengan Provinsi Palawan dan membentang sekitar 300 mil ke arah barat, ke dalam jantung ZEE Filipina (Joyner, 1999).

Secara *de facto* Tiongkok sudah mengklaim lebih awal Laut Tiongkok Selatan termasuk Kepulauan Spratly melalui hak historis. Sedangkan Filipina secara *de facto* mengklaim Kepulauan Spratly pada tahun 1947 namun argumen Filipina di dukung melalui *de jure* yaitu hukum UNCLOS. Kedua negara memiliki klaim yang berdasar hal tersebutlah yang membuat kawasan Kepulauan Spratly menjadi kawasan konflik Filipina mulai berkonflik dengan Tiongkok di Kepulauan Spratly pada tahun 1995. Ketika Tiongkok menduduki *Mischief Reef* yang terletak di Laut Filipina Barat. Dimana Tiongkok membangun infrastruktur nelayan di atas atol yang setengah tenggelam tersebut. Pemerintah Filipina sangat keberatan dengan tindakan Tiongkok tersebut (Inuhan et al., 2021).

Pada tahun 2011 konflik kembali terjadi di Kepulauan Spratly, kapal kapal pengintai Tiongkok memaksa kapal Filipina yang melakukan survei di Reed Bank, Kepulauan Spratly, untuk meninggalkan daerah tersebut (Song & Zou, 2016). Diakibatkan kembali nya insiden di Kepulauan Spratly oleh Tiongkok, Filipina merespon dengan meminta bantuan militer kepada Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat merupakan sekutu lama Filipina. Sebagai bentuk respon, Amerika Serikat menggelar latihan gabungan dengan angkatan bersenjata Filipina pada tahun 2011 (Pamungkas, 2013). Selain itu, Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan militer Filipina melalui memodernisasi militer Filipina dan penyediaan kebutuhan militer Filipina (Pamungkas, 2013). Ketegangan antara Filipina dan Tiongkok terus berlanjut hingga tahun 2012. Terjadi insiden pengepungan kapal patroli Filipina oleh kapal patroli Tiongkok (Kostermans, 2012). Insiden tersebut mengalami kebuntuan hingga 2 bulan. Insiden tersebut memberikan perhatian publik, ratusan warga Filipina melakukan aksi protes di depan kantor kedutaan besar Tiongkok di

Manila. Aksi protes tersebut menuntut Tiongkok untuk memerintahkan kapalnya meninggalkan wilayah Scarborough Shoal (Kostermans, 2012). Konflik tersebut melatarbelakangi pemerintah Filipina untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional yaitu *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Pada tahun 2013 pemerintah Filipina mengajukan gugatan kepada PCA mengenai klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Keputusan PCA dikeluarkan pada 12 Juli tahun 2016, dalam keputusan tersebut terdapat 4 poin penting.

Dalam *press-release* PCA, 2016 menyampaikan. Pertama, Klaim Tiongkok berdasarkan hak *historis* adalah klaim yang tidak sah. Kedua, pulau pulau buatan dan fitur fitur maritim buatan yang dibangun oleh Tiongkok tidak mendapatkan hak zona maritim. Ketiga, Tiongkok telah melanggar kewajibannya selama sidang PCA, karena selama proses sidang PCA masing masing pihak harus menahan diri untuk beraktivitas di kawasan yang disengketakan. Namun selama proses sidang PCA Tiongkok membangun pulau buatan berskala besar di Kepulauan Spratly. Keempat, PCA berpendapat bahwa akar perselisihan dalam arbitrase ini terletak pada perbedaan penafsiran mengenai hak-hak masing-masing pihak tentang konvensi. PCA berharap bahwa Tiongkok berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan Filipina serta mematuhi kewajibannya sesuai dengan UNCLOS dalam jangka waktu mendatang. Kemudian PCA juga menegaskan sesuai dengan pasal 11 lampiran VII UNCLOS yang berbunyi “putusan harus dipatuhi oleh pihak pihak yang berselisih (*Press-Release* PCA, 2016).

Keputusan PCA tersebut memperkuat dasar Filipina mengklaim Kepulauan Spratly. Namun Tiongkok secara tegas menolak dan tidak mengakui putusan PCA 2016 yang menyatakan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan termasuk Kepulauan Spratly melalui *nine dash line* tidak memiliki dasar hukum internasional (Zebua & Shiddiqy, 2025). Pemerintah Tiongkok menyebut proses arbitrase tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa Laut Tiongkok Selatan (Consulate Government China, 2016). Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei menyatakan bahwa putusan PCA 2016 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena Tiongkok tidak ikut serta dalam proses arbitrase tersebut (Consulate Government China, 2016).

Strategi *Bandwagoning* Filipina

Dalam menggunakan strategi *bandwagoning* perlu mengklasifikasikan berbagai ancaman terlebih dahulu agar membuktikan negara yang menjadi ancaman memberikan ancaman yang nyata bagi negara pelaku *bandwagoning*. Stephen M Walt (1985) mengatakan ada 4 faktor yang dapat diukur untuk menentukan negara menjadi ancaman yaitu, *geographic proximity*, *aggregate power*, *offensive power* dan *aggressive intention*. Kemudian Walt juga menyampaikan ada 3 kondisi yang ikut mendorong negara melakukan *bandwagoning* yaitu, kondisi adanya posisi negara kuat dan lemah, kondisi tidak adanya aliansi atau sekutu dan kondisi negara lemah akan cenderung oportunis.

Faktor pertama yang menjadi ancaman suatu negara ialah *Geographic Proximity*. Kedekatan geografis atau *geographic proximity* yang berarti berkaitan dengan jarak antara negara yang terancam dan negara pengancam. Dengan jarak yang lebih jauh, prediksi kekuatan negara semakin terbatas yang berarti potensi ancaman semakin kecil. Tiongkok dan Filipina berada di benua yang sama yaitu benua Asia namun Tiongkok dan Filipina di kawasan Asia yang berbeda. Kemudian kawasan jantung Kepulauan Spratly juga menimbulkan ancaman. Karena seluruh kawasan Kepulauan Spratly merupakan bagian dari *nine dashed line* Tiongkok. Ancaman tersebut berupa Pembangunan landasan pacu, hanggar pesawat, lokasi radar dan tempat perlindungan rudal permukaan ke udara. Pembangunan tersebut berada di tiga terumbu karang yang diklaim Filipina yaitu Fiery Cross, Subi Reef dan Mischief Reef (Avendano, 2017). Dengan demikian dari segi faktor *geographic proximity*, Tiongkok merupakan ancaman bagi Filipina. Meskipun Tiongkok dan Filipina tidak terhubung melalui daratan namun wilayah perairan Filipina terhubung dengan Laut Tiongkok Selatan melalui Kepulauan Spratly. Dengan adanya klaim *nine dashed line* di Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok akan memberikan ancaman bagi Filipina.

Faktor kedua, adalah *aggregate power* merupakan penilaian kekuatan ancaman berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh negara (Walt, 1985). *Aggregate power* secara umum dapat didasari kemampuan militer, jumlah populasi dan kekuatan ekonomi. Kekuatan tersebut menjadi indikator dari *aggregate power*. Semakin besar

aggregate power yang dimiliki suatu negara maka semakin besar ancaman yang dapat ditimbulkan. Dalam hal ini akan membandingkan kekuatan dari Tiongkok dan Filipina. Secara jumlah populasi Tiongkok memiliki populasi yang besar yaitu sekitar 1,3 Miliar jiwa sedangkan Filipina memiliki 105 juta jiwa (Worldometer, 2015). Kemudian dari segi kekuatan ekonomi, GDP Tiongkok Tiongkok senilai 11.007.721 Million US Dollars dan Tiongkok berada di GDP terbesar nomor 2 di dunia pada tahun 2015. Sedangkan Filipina GDP nya senilai 292,451 Million US Dollars dan Filipina berada di peringkat 38 pada tahun 2015 (World Bank, 2015). Selanjutnya dari segi kekuatan militer dalam peringkat kekuatan militer dunia berdasarkan indeks Global Fire Power (2015), pada tahun 2015 Tiongkok berada di peringkat ke 3 sedangkan Filipina berada di peringkat 41 dari 145 negara. Hal ini menunjukkan kapabilitas militer Tiongkok lebih kuat daripada Filipina. Baik dari segi populasi, ekonomi dan militer Tiongkok jauh lebih unggul dari Filipina.

Faktor ketiga, *Offensive Power* ialah kemampuan suatu negara untuk menyerang didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya sebagai alat perang. total personel aktif Tiongkok berjumlah 2 Juta lebih sedangkan personel aktif Filipina berjumlah 125 ribu (CSIS, 2017). Karena kasus sengketa *nine dash line* berada di laut maka penulis akan melihat kapabilitas militer di laut. Personel angkatan laut Tiongkok yang aktif pada tahun 2015 berjumlah 235 ribu personel sementara Filipina berjumlah 24 ribu personel (CSIS, 2017). Dalam kapabilitas militer angkatan laut dapat dilihat juga melalui jumlah kapal perang. kapal laut Tiongkok berjumlah 304 kapal sedangkan Filipina 91 kapal. Kemudian Tiongkok juga membangun pulau - pulau buatan untuk pangkalan militer angkatan laut Tiongkok (Philippines Navy, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan dari segi faktor *Offensive Power* Tiongkok dapat menjadi ancaman nyata bagi Filipina. Karena kemampuan *Offensive Power* nya sangat besar. Hal tersebut didukung dengan kapabilitas militer Tiongkok yang sangat mumpuni.

Faktor keempat, *Aggressive Intention* dapat diukur melalui pernyataan pemerintah negara pengancam, kebijakan dan manuver yang diambil oleh negara pengancam yang menunjukkan niat agresif (Walt, 1987). Terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan niat agresif Tiongkok. Seperti pernyataan Tiongkok untuk memperingatkan tidak boleh mengeksplorasi minyak di perairan Laut Tiongkok

Selatan (Calica, 2011). Kemudian pernyataan untuk meningkatkan patroli maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan (Thayer, 2011). Selanjutnya pernyataan dari Presiden Xi Jinping menekankan bahwa Tiongkok tetap mempertahankan klaimnya di Laut Tiongkok Selatan. Xi Jinping beralasan bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah warisan leluhur yang senantiasa akan mendapatkan dukungan dari Tiongkok (Adiyudha, 2018). Dan pernyataan penolakan Tiongkok terhadap keputusan PCA 2016. Serta *aggressive intention* Tiongkok juga terlihat dari beberapa tindakan Seperti insiden kapal patroli Tiongkok yang intimidatif, pembangunan pulau buatan, pembangunan fasilitas militer di Kepulauan Spratly. Menurut pemerintah Filipina tindakan tindakan yang dilakukan Tiongkok tersebut merupakan aktivitas agresif yang melanggar kedaulatan dan hukum internasional (Farhah, 2017).

Dalam menganalisa *Bandwagoning* terdapat tiga kondisi yang mendorong suatu negara mengambil sikap *Bandwagoning*. Pertama adalah kondisi posisi negara kuat dan negara lemah. Negara lemah dapat memilih *bandwagoning* dengan alasan mereka negara lemah rentan akan serangan dan juga kemampuan mereka tidak menimbulkan banyak perubahan. Hal tersebut terlihat dari pemaparan penulis diatas bahwa Tiongkok negara yang jauh lebih unggul baik dari kekuatan ekonomi dan kapabilitas militer nya ketimbang Filipina. Kondisi kedua, negara lemah cenderung melakukan *bandwagoning* ketika tidak adanya sekutu untuk beraliansi. Seperti penulis yang paparkan sebelumnya hubungan Filipina dengan Amerika Serikat memburuk dibawah pimpinan Presiden Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016. kondisi ketiga yaitu negara lemah cenderung oportunis. Menurut Scheweller (1994) negara lemah tidak hanya sekedar mencari keamanan atau menghindari ancaman tetapi juga ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari bergabung dengan kekuatan besar.

Empat faktor *Bandwagoning* diatas membuat Tiongkok menjadi ancaman bagi Filipina. Faktor *Geographic Proximity* dan *Aggressive Intention* mendorong Filipina melakukan sikap *bandwagoning*. Lalu dari segi faktor *Aggregate Power* dan *Offensive Power* menunjukkan sumber daya Tiongkok sangat besar dan unggul baik dari segi ekonomi maupun militer. Kekuatan Tiongkok tidak hanya unggul di Asia namun juga di dunia. Kekuatan Tiongkok yang sangat besar ini dapat menjadi sebuah peluang Filipina untuk beraliansi agar Filipina mendapatkan hak nya di Kepulauan Spratly.

Sikap aliansi Filipina merupakan strategi *bandwagoning* Filipina yang diwujudkan melalui berbagai kerjasama. Hal yang pertama dilakukan Filipina ialah upaya perbaikan hubungan bilateral Filipina dan Tiongkok. Hubungan bilateral Filipina dan Tiongkok sempat mengalami ketegangan di era sebelum Duterte tepatnya ketika era presiden Benigno Aquino III.

Perbaikan hubungan tersebut diwujudkan dengan mengimplementasikan *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM), yaitu sebuah agenda pertemuan rutin mengenai penyelesaian persoalan sengketa kedaulatan diantara keduanya (Fook, 2018). Kemudian dalam pertemuan BCM juga menghasilkan 3 keuntungan bagi Filipina. Pertama akses aktivitas nelayan Filipina di kawasan Laut Tiongkok Selatan tanpa terganggu oleh pihak Tiongkok. Kedua, perlindungan lingkungan Laut Tiongkok Selatan dengan dukungan Tiongkok. Ketiga, komitmen dari Tiongkok untuk tidak membangun wilayah tak berpenghuni sesuai deklarasi COC (Departmen Foreign affairs Philipine, 2018). Di kawasan Reed Bank Kepulauan Spratly terdapat kerjasama Filipina dan Tiongkok mengenai eksplorasi pengelolaan sumber daya alam dengan presentase 60% untuk Tiongkok dan 40% untuk Filipina (Mogato, 2018).

Filipina dan Tiongkok juga melakukan kerjasama dalam bidang keamanan maritim Laut Tiongkok Selatan. Berdasarkan faktor *offensive power* kapabilitas militer Tiongkok jauh lebih unggul dibanding Filipina kemudian angkatan laut Tiongkok juga sangat mumpuni (CRS, 2015). Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pembentukan komite kerjasama pasukan penjaga pantai kedua negara atau yang dikenal dengan *Philippines-China Joint Coast Guard Comittee* (JCGC). Tujuan JCGC adalah menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berdiskusi mengenai sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, kerjasama JCGC ini juga dirancang untuk menghentikan dan memberantas perdagangan narkoba maupun kejahatan lintas negara lainnya. kegiatan JCGC juga termasuk pelatihan pertukaran personel. Pelatihan diberikan oleh akademi kepolisian Tiongkok kepada personel *Philippines Coast Guard* (PCG) yaitu merupakan personel penjaga pantai Filipina (Philippines Star, 2020).

Filipina juga melakukan kerjasama dengan Tiongkok diluar masalah Kepulauan Spratly. Berdasarkan faktor *aggregate power* Tiongkok memiliki sumber daya yang besar. Kekuatan ekonomi dan kapabilitas militer Tiongkok sangat kuat daripada

Filipina. Menurut Randall Scheweller dalam tulisannya *Bandwagoning For Profit* (1994), Sikap *bandwagoning* bukanlah merupakan sekedar tindakan untuk menghindari ancaman demi keamanan melainkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau nilai tambah (self-extension). Dalam kunjungan tersebut Tiongkok dan Filipina menyepakati kerjasama ekonomi yang menghasilkan beberapa kesepakatan investasi dan pendanaan yang mencapai \$24 Miliar, yang dimana \$15 Miliar untuk proyek investasi dan \$9 Miliar untuk fasilitas kredit (Farhah, 2017). Tiongkok memberikan pinjaman kredit senilai \$9 Miliar, yang termasuk di dalamnya alokasi dana \$15 Juta khusus untuk program rehabilitasi narkoba guna mendukung kampanye anti narkoba Presiden Duterte (Farhah, 2017). Tiongkok juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan volume impor buah buahan dari Filipina dan meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke Filipina (Koty, 2016).

Dalam bidang keamanan Filipina juga membangun kerjasama dengan Tiongkok. Terdapat ancaman internal Filipina yang akan menjadi fokus presiden Duterte dalam mewujudkan keamanan nasional, ancaman tersebut ialah kejahatan internasional dan peredaran narkoba secara ilegal. Filipina meminta bantuan kepada Tiongkok untuk menjaga keamanan nasional (Tiezzi, 2018).

4. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi Filipina dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Kepulauan Spratly melalui strategi *bandwagoning*. Sikap *bandwagoning* sendiri ialah bersekutu dengan negara yang merupakan ancaman. Dalam menggunakan strategi *bandwagoning* perlu mengidentifikasi terlebih dahulu negara yang menjadi ancaman yang dimana di penelitian ini Tiongkok adalah negara ancaman bagi Filipina. Melalui Faktor *geographic proximity* dan *aggressive intention* menunjukkan ancaman yang nyata dari Tiongkok. Strategi *Bandwagoning* Filipina tercermin ketika Filipina melakukan pendekatan kerjasama bersama Tiongkok. Pendekatan Filipina ini terjadi ketika era Presiden Rodrigo Duterte tahun 2016-2022. Berdasarkan faktor *aggregate power* dan *offensive power* Tiongkok memiliki sumber daya yang besar baik dari kekuatan ekonomi maupun kekuatan militer jauh dibanding Filipina. Sehingga Filipina melakukan *bandwagoning* agar dapat menghindari ancaman dan juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan Tiongkok.

Melalui sikap *bandwagoning* tidak hanya terhindar dari ancaman namun mendapatkan keuntungan dengan negara ancaman karena negara yang menjadi ancaman adalah negara yang kuat, keuntungan tersebut dapat dihasilkan melalui kerjasama. Dalam praktiknya Filipina memperkuat hubungan bilateral Filipina dengan Tiongkok melalui berbagai mekanisme, seperti *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM), melalui BCM ini Filipina mendapatkan keuntungan berupa sumber daya alam di Kepulauan Spratly kemudian di mekanisme *Joint Coast Guard Committee* (JCGC), Filipina bekerjasama keamanan maritim bersama Tiongkok. Filipina juga melakukan kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Tiongkok untuk internal Filipina.

REFERENSI

- Adiyudha R. (2018). Xi Jinping tak akan angkat kaki dari Laut China Selatan. *Republika*. Tersedia di: <https://internasional.republika.co.id/berita/pb0pwq366/xi-jinping-tak-akan-angkat-kaki-dari-laut-cina-selatan>
- Avendano. (2017). *Esperon: PH can't stop China buildup on isles*. Tersedia di: <https://globalnation.inquirer.net/154115/esperon-ph-cant-stop-china-buildup-isles>
- Departmen Foreign Affairs. (2018). Phillipines Highlights Strong Commitment to protect marine. Tersedia di <https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/37164-philippines-highlights-strong-commitment-to-protect-marine-environment-rejects-china-s-unlawful-nature-reserve-claim-over-bajo-de-masinloc-at-13th-expanded-asean-maritime-forum> :
- Farhah Z. (2017). Kebijakan Tiongkok dalam Kerjasama Ekonomi dengan Filipina pasca Hasil Putusan PCA tahun 2016. Tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42188/3/ZIDA%20TIARA%20FARHAH-FISIP.pdf>
- Fatmawati A & Aprina E (2019) Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional. I (5), 105-129. Tersedia di: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/3289/2709>
- Hardani, Auliya & Andriani. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group
- Hikmawati F (2020). Metodologi Penelitian. tersedia di: <https://share.google/dlmopAQb2tMEmxFHs>
- Inuhan, et al. (2021). Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spartly). *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 192–205. Tersedia di: Upaya Hukum Filipina untuk Mendapatkan Hak Berdaulat atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spartly) | Inuhan | TATOH:

Jurnal Ilmu Hukum

- Karmilawaty R & Janvy C. (2023). Agresivitas Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa Wilayah dengan Filipina di Pulau Thitu. *Bhuvana. Journal of Global Studies*. 2(2). 203-223.
<https://jurnalhiusni.org/index.php/bhuvana/article/view/51/59>
- Koty A. (2016). *China-Philippine Relations: Implications for Foreign Investment*. Tersedia di: <https://www.china-briefing.com/news/china-philippines-relations-implications-foreign-investment/>
- Mogato. (2018). Philipines, China to work out how to dap oil, gas that both sides claim. Reuters. Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/markets/currencies/philippines-china-to-work-out-how-to-tap-oil-gas-that-both-sides-claim-idUSKCN1FY0LM/>
- Nasir & Siti. (2017) Penyelesaian pertikaian Kepulauan Spratly. Memanfaatkan Perjanjian Pembangunan bersama di bawah UNCLOS 1982, VI(1), 19-40. Tersedia di: [https://repository.unimal.ac.id/5600/1/1.%20PENYELESAIAN%20PERTIKAIAN%20KEPULAUAN%20SPRATLY_MEMANFAATKAN%20PERJANJIAN%20PEMBANGUNAN%20BERSAMA%20\(Reusam\).pdf](https://repository.unimal.ac.id/5600/1/1.%20PENYELESAIAN%20PERTIKAIAN%20KEPULAUAN%20SPRATLY_MEMANFAATKAN%20PERJANJIAN%20PEMBANGUNAN%20BERSAMA%20(Reusam).pdf)
- Nugraha Ogi, (2021) Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN, XI (4), 25-42. Tersedia di: <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/414>
- Pamungkas H. (2013). Kehadiran Armada Militer Amerika Serikat Pada Sengketa Kepulauan Spratly tahun 2011 Tersedia di: <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58839/Handhitya%20Yanuar%20Pamungkas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Permanent Court Arbitration. (2016). *The South China Sea Award*. Tersedia di: <https://pcacases.com/web/sendAttach/2086>
- Quy Ho, (2014). The Process of Possesing and Excersing Sovereignty of Vietnam Over the Paracel and Spratly Islands - True Uninterrupted, Peaceful and Transparent, VIII (2), 3-18. Tersedia di: <https://vjol.info.vn/index.php/ssirev/article/download/21855/18662/>
- Song Y & Zou K. (2016). *Major Law and Policy Issues in the South China Sea: European and America Perspectives*. Routledge
- Schweller R, (1994). *Bandwagoning for the profit: Brimging the Revisionist State back in. international security*. 19 (1), 72-107. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/2539149?seq=1>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Tersedia di: <https://share.google/TJWwox8vkFh01Co5K>
- the Economist . (2014). *Joining the dashes*. Tersedia di : <https://www.economist.com/asia/2014/10/04/joining-the-dashes>
- Tiezzi S. (2018). Duterte's China Convergence Continues. The diplomat. Tersedia di: <https://thedi diplomat.com/2018/04/dutertes-china-convergence-continues/>
- Worldometer. (2015) *Gross Domestic Product*. Tersedia di: <https://share.google/tTAa3hu6fCZhE1oMO>
- Walt S, (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *Inernational Security*. 4(9) (3-43).
<https://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/walt%201985.pdf>